

PENGARUH GOOD GOVERNANCE, PENGENDALIAN INTERNAL DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi pada OPD Kota Semarang)

Nida Rihadatul Aisy, Haryanto¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This study aims to investigate the impact of Good Governance, Internal Control, and Regional Financial Accounting System on the performance of Local Government in OPD Semarang City, Central Java Province. The population used in the study is the Regional Apparatus Organization (OPD) of Semarang City, and a sample of 94 civil servants of the Semarang City Government was selected using purposive sampling. The data collected was analyzed using multiple regression analysis. The results of the study show that Good Governance and Internal Control have a significant impact on Local Government Performance. However, the Regional Financial Accounting System does not have a significant impact on Local Government Performance.

Keywords: Good Governance, Internal Control, Regional Financial Accounting System, Local Government Performance.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan adanya hak, kekuasaan, serta tanggung jawab wilayah otonom untuk mengurus serta mengelola sendiri baik administrasi pemerintahan maupun kepentingan masyarakat daerah pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut membuat pemerintah daerah memiliki wewenang dan tugas sendiri untuk mengatur wilayah mereka. Tanggung jawab dan wewenang tersebut menunjukkan bahwa pemda bertanggung jawab pada tugas yang harus dijalankan demi kepentingan masyarakat. Tanggung jawab tersebut tercermin melalui kinerja dari pemerintah daerah.

Elkha (2020) menerangkan bahwa masyarakat menyoroti kinerja pemerintah daerah yang dirasa masih kurang memuaskan. Karena itu, masyarakat menuntut kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penerapan otonomi daerah. Pasal 3 dan 5 dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menegaskan adanya prinsip umum penyelenggaraan negara yang memerlukan transparansi sehingga penyelenggara negara diharuskan untuk bersedia menjalani pemeriksaan atas kekayaannya sebelum, selama, dan setelah masa jabatan serta melarang praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Melihat hal tersebut maka tercipta rancangan *good governance*. *Good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip-prinsip yang berorientasi pada rakyat dan pengembangan organisasi. Dorongan terciptanya *good governance* adalah adanya perkembangan zaman dan globalisasi. Oleh karenanya, pemerintah didorong untuk dapat bersikap terbuka dan sistematis dalam kerjanya. Keterbukaan ini dapat menambah pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang mana berarti memperkuat unsur demokrasi di dalamnya.

¹ Corresponding author

Menurut Mulyadi (2013) pengendalian internal menjadi Langkah organisasi dalam memberikan keyakinan yang memadai demi mencapai tujuan organisasi tersebut. Pengendalian internal mengarahkan organisasi untuk mencapai operasi yang efisien dan efektif, pelaporan yang andal hingga kepatuhan dalam peraturan yang berlaku. Pengendalian internal yang baik akan membuat manajemen dari suatu organisasi menjadi lebih efektif dan efisien karena pengelolaan sumber daya yang dilandaskan oleh pengendalian internal yang baik dapat menghasilkan output yang optimal.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sistem ini mencakup berbagai proses mulai pengumpulan data hingga pelaporan sebagai pertanggung jawaban atas APBD. Sistem ini akan menghasilkan laporan keuangan sehingga membentuk adanya transparansi bagi Masyarakat. Menurut Ireeuw (2020) Data dari sistem akuntansi keuangan daerah yang diberikan dengan efisien dan efektif memberikan pencegahan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan di dalam organisasi.

Pemerintah Kota Semarang dipilih sebagai lokasi penelitian ini dikarenakan terdapat aduan sebanyak 6.466 di tahun 2021 pada laman *web*. Hal ini menunjukkan pelayanan yang kurang memuaskan dari pemerintah daerah kepada Masyarakat. Terlebih lagi, dilansir dari Kompas.com, terdapat beberapa OPD yang gagal mencapai target PAD di tahun 2022 yang menunjukkan kinerja yang kurang optimal dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, dilansir dari Kompas.com, terdapat pelaporan Wali Kota Semarang dan direktur RSUD kepada Ombudsman terkait insentif COVID-19 tahun 2022 yang mengindikasikan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari kinerja pemerintah daerah.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Stewardship

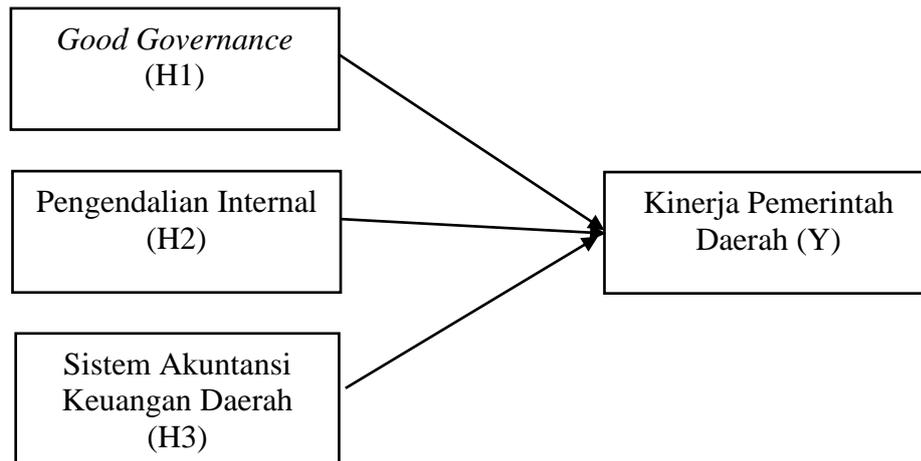
Donaldson dan Davis (1991) mendefinisikan *stewardship theory* sebagai manajemen sebagai steward yang lebih mementingkan sasaran hasil utama organisasi daripada kepentingan pribadinya. Menurut Putra dkk (2022) Teori Stewardship mengemukakan bahwa individu memiliki hubungan perjanjian dengan organisasinya yang mewakili komitmen moral dan mengikat kedua belah pihak untuk bekerja menuju tujuan bersama, tanpa mengambil keuntungan satu sama lain. Sehingga teori dapat digunakan pada organisasi sektor publik yang bekerja tanpa profit dan untuk kepentingan rakyat.

Menurut Morgan (1996) *Stewardship theory* dapat diterapkan pada penelitian untuk akuntansi organisasi sektor publik. Akuntansi organisasi sektor publik menghubungkan pemenuhan kebutuhan informasi bagi hubungan antara *steward* (pemerintah daerah) dan *principals* (masyarakat). Hubungan ini dilandasi oleh adanya kepercayaan dimana *principal* percaya bahwa *steward* akan mengambil keputusan dengan didasarkan oleh kepentingan organisasi sehingga apabila *steward* memiliki pandangan yang berbeda maka *steward* akan lebih mengutamakan pandangan organisasi.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dalam bentuk skema. Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen.

Gambar 1
Kerangka Konseptual



Pengaruh *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Good governance yaitu penyelenggaraan manajemen yang dilaksanakan melalui berbagai prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, keadilan, consensus, *rule of law*, efisiensi dan efektivitas, visi yang jauh kedepan, dan responsiveness. Prinsip-prinsip tersebut berorientasi pada kepentingan organisasi dan meminimalkan kepentingan pribadi yang mana hal ini sejalan dengan *stewardship theory*. Sehingga pengambilan Keputusan organisasi akan berorientasi pada kepentingan organisasi, bukan kepentingan pribadi. Hal ini akan meminimalkan kesalahan dalam pengambilan Keputusan yang mana dapat memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Riset Lestari (2020) membuktikan *good governance* memiliki pengaruh yang bersifat positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan riset Saputro (2021) membuktikan prinsip-prinsip *good governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai sehingga dirumuskan hipotesis pertama, yakni:

H1 : *Good governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pengendalian internal dalam pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah telah menjalankan kinerja dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan dengan *stewardship theory* dimana kepentingan organisasi lebih diutamakan. Pengendalian internal membuat organisasi patuh terhadap peraturan. Dalam pemerintah daerah terdapat aturan mengenai pencegahan dalam penyelewengan. Apabila penyelewengan dapat dicegah maka pengelolaan sumber daya akan semakin optimal. Pengelolaan sumber daya yang optimal tersebut dapat menandakan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah. Riset Elkha (2020) membuktikan bahwa pengendalian internal mempunyai dampak signifikan pada kinerja pemerintah daerah. Akan tetapi, dalam riset Putra dkk (2022)

membuktikan pengendalian internal tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja instansi. Maka dari itu, dapat dirumuskan hipotesis kedua, yakni:

H2 : Pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah. Apabila laporan keuangan yang andal maka akan meningkatkan transparansi kepada Masyarakat. Adanya transparansi tersebut dapat meningkatkan pengawasan dari Masyarakat. Pengawasan akan mendorong manajemen untuk mengedepankan kepentingan Masyarakat. Hal ini sejalan dengan *stewardship theory* Dimana kepentingan organisasi lebih dikedepankan daripada kepentingan pribadi. Berbagai sumber daya dan potensi sumber daya akan dikelola sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan penuh serta mensejahterakan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan masyarakat melalui berbagai output yang diberikan. Kepuasan tersebut menandakan adanya kinerja yang baik. Riset Lestari (2020) membuktikan SAKD mempunyai dampak positif dengan signifikan pada kinerja pemerintah daerah. Akan tetapi, pada riset Triwulandari dkk (2022) membuktikan SAKD tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Maka dari itu, hipotesis ketiga, yakni:

H3 : Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh kepala OPD dan seluruh pegawai bagian keuangan pada OPD Pemerintah Kota Semarang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini yaitu kepada OPD, kasubbag keuangan OPD, dan staff keuangan OPD pada Pemerintah Kota Semarang yang berjumlah 102 responden, namun kuesioner yang mendapat jawaban berjumlah 94 kuesioner. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* yang mana menurut Sugiyono (2014) yaitu penentuan sampel dengan ciri tertentu. Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan menggunakan data primer dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner skala likert 1-5.

Variabel Penelitian

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *good governance*, pengendalian internal, dan sistem akuntansi keuangan daerah. Sementara variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah. Ringkasan dari definisi operasional variabel dependen dan independen adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Pengukuran
<i>Good Governance</i>	Good Governance ialah pengelolaan manajemen yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar	1. Akuntabilitas 2. Transparansi 3. Partisipasi 4. <i>Rule of law</i>	Skala Ordinal 1-5

	yang efisien, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif. menjalankan disiplin anggaran, serta menciptakan kerangka kerja hukum dan politik untuk mendukung pertumbuhan aktivitas usaha. (<i>world Bank</i> dalam Mardiasmo, 2002)	(Sedarmayanti, 2004)	
Pengendalian Internal	Pengendalian internal adalah rangkaian langkah yang ditempuh oleh individu di suatu organisasi untuk memastikan tingkat kepercayaan yang memadai, mencapai tujuan organisasi dengan memastikan keandalan laporan keuangan, ketaatan pada peraturan yang ada, dan peningkatan kinerja operasional untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih baik. (Mulyadi, 2013)	1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Pengendalian	Skala Ordinal 1-5
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	(SPIP dalam PP Nomor 60 tahun 2008) 1. Pencatatan 2. Pengikhtisaran 3. Pelaporan	Skala Ordinal 1-5
Kinerja Pemerintah Daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan	(Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) 1. Masukan 2. Proses 3. Keluaran 4. Hasil	Skala Ordinal 1-5

pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ataudampak. (PP Nomor 6 Tahun 2008)	5. Manfaat (PP Nomor 6 Tahun 2008)
---	------------------------------------

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 102 kuesioner yang dibagikan namun kuesioner yang mendapat jawaban berjumlah 94 kuesioner. Kuesioner dibagikan secara langsung kepada setiap OPD Kota Semarang. Dari pengisian kuesioner tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 55,3% responden Wanita, 36,2% laki-laki dan 8,5% tidak diketahui. Sedangkan reponden yang berusia 20-30 tahun sebanyak 28,7%, usia 30-40 tahun sebanyak 25,5%, usia 40-50 tahun sebanyak 20,2%, usia >50 tahun sebanyak 16%, dan usia yang tidak diketahui sebanyak 9,6%. Sedangkan apabila responden dilihat berdasarkan jabatan maka terdapat kepada OPD sebanyak 27,7%, kasubbag keuangan sebanyak 36,2% dan staff keuangan 36,2%.

Uji Instrumen Data

Uji Validitas

Uji validitas ini digunakan untuk mengukur valid tidaknya pernyataan. Penelitian ini memakai rtabel sebesar 0,2028 yang diperoleh melalui nilai sig 0,05 serta jumlah sampel (n) sebesar 94. Pernyataan pada kuesioner ini dinyatakan valid jika hasil $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Tabel 2

Hasil Uji Validitas

Variabel	R hitung Rata-Rata	R tabel	Keterangan
Good Governance	0,842	0,2028	Valid
Pengendalian Internal	0,728	0,2028	Valid
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,854	0,2028	Valid
Kinerja Pemerintah Daerah	0,760	0,2028	Valid

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan pada tabel diatas, semua r_{hitung} rata-rata pada setiap variabel dalam penelitian ini berada diatas r_{tabel} (0,2028), sehingga variabel good governance, pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kinerja pemerintah daerah dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat keandalan suatu kuesioner dari variabel penelitian yang digunakan. Pada uji reliabilitas penelitian ini diukur menggunakan Cronbach Alpha (α).

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha (α) Hasil Uji	Cronbach Alpha (α)	Keterangan
Good Governance	0,815	0,60	Reliabel
Pengendalian Internal	0,677	0,60	Reliabel
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,730	0,60	Reliabel
Kinerja Pemerintah Daerah	0,748	0,60	Reliabel

Sumber : Data diolah, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas dari keempat variabel penelitian. Dapat disimpulkan bahwa keempat variabel tersebut mempunyai nilai *Cronbach Alpha* diatas 0,6. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kuesioner penelitian ini adalah reliabel.

Statistik Deskriptif

Tabel 4
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
<i>Good Governance</i>	94	15	20	18.04	1.703	2.901
Pengendalian Internal	94	16	25	20.80	2.232	4.980
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	94	10	15	13.06	1.382	1.910
Kinerja Pemerintah Daerah	94	13	25	20.04	2.510	6.299

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel tersebut dapat diperoleh informasi bahwa variabel *Good Governance* dengan jumlah 4 pertanyaan di dalam kuesioner memiliki nilai minimal 15 dan maksimal 20 dengan jumlah rata-rata (mean) sebanyak 18,04 dan standar deviasinya 1,703. Berdasarkan hasil tersebut nilai standar deviasi lebih kecil dari mean. Jadi, dapat dikatakan penyimpangan data pada variabel tersebut rendah dan data tersebar merata.

Untuk variabel Pengendalian Internal mempunyai nilai minimal 16 dan maksimal 25 dengan jumlah rata-rata (mean) sebanyak 20,80 dan standar deviasinya 2,232. Berdasarkan hasil tersebut nilai standar deviasi lebih kecil dari mean. Jadi, dapat dikatakan penyimpangan data pada variabel tersebut rendah dan data tersebar merata.

Sedangkan variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai nilai minimal 10 dan maksimal 15 dengan jumlah rata-rata (mean) sebanyak 13,06 dan standar deviasinya 1,382. Berdasarkan hasil tersebut nilai standar deviasi lebih kecil dari mean. Jadi, dapat dikatakan penyimpangan data pada variabel tersebut rendah dan data tersebar merata.

Sementara itu, variabel Kinerja Pemerintah Daerah mempunyai nilai minimal 13 dan maksimal 25 dengan jumlah rata-rata (mean) sebanyak 20,04 dan standar deviasinya

2,510. Berdasarkan hasil tersebut nilai standar deviasi lebih kecil dari mean. Jadi, dapat dikatakan penyimpangan data pada variabel tersebut rendah dan data tersebar merata.

Uji Statistik t (Uji t)

Menurut Ghozali (2018) uji t dipakai untuk memberi informasi seberapa besar variabel independen membantu menjelaskan variabel dependen. Variabel independen memiliki keterkaitan secara parsial pada variabel dependen apabila signifikansinya < dari 0,05. Namun, apabila ambang signifikansi > 0,05, variabel independen memiliki keterkaitan yang kecil pada variabel dependen.

Tabel 5

Hasil Uji Statistik t

Variabel	t	Sig.
<i>Good Governance</i>	2,251	0,027
Pengendalian Internal	3,688	0,000
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	1,531	0,129

Sumber: Data diolah, 2024

Dapat dilihat nilai sign variabel *good governance* sejumlah 0,027 < 0,05 serta angka t hitung 2,251 > 1,986. Dengan demikian bisa diartikan bahwasanya H1 diterima. Artinya, terdapat pengaruh *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah.

H1 Diterima

Sedangkan nilai sign variabel pengendalian internal sejumlah 0,000 < 0,05 serta angka t hitung 3,688 > 1,986. Dengan demikian bisa diartikan bahwasanya H2 diterima. Artinya, terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah.

H2 Diterima

Sementara itu, nilai sign variabel sistem akuntansi keuangan daerah sejumlah 0,129 > 0,05 serta angka t hitung 1,531 < 1,986. Dengan demikian bisa diartikan bahwasanya H1 ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

H3 Ditolak

Uji Statistik Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mendapatkan informasi terkait signifikansi keterkaitan antara variable bebas dengan variabel terikat secara bersamaan. Semua variabel bebas mempunyai pengaruh pada variabel terikat jika signifikansi uji < 0,05. Jika ambang signifikansi > 0,05 maka variabel independen tidak memiliki keterkaitan secara simultan pada variabel dependen.

Tabel 6

Hasil Uji F

Model	Sum of squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	271,471	3	90,490	25,907	0,000 ^b
Residual	314,359	90	3,493		
Total	585,830	93			

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan hasil uji F sebesar $25,907 > 2,71$, dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, bisa diartikan bahwasanya variabel independen berpengaruh pada variabel dependen secara simultan.

Interpretasi Hasil

Pengaruh *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil uji t dapat diketahui bahwa pada variabel *good governance* memiliki nilai t hitung $2,251 > t_{\text{tabel}} 1,986$ serta memiliki nilai sign $0,027$ yang mana $< 0,05$. Oleh karena itu, H1 diterima yang menandakan bahwa variabel *good governance* berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kinerja pemerintah daerah. Perolehan tersebut selaras dengan Lestari (2020), dan Saputro (2021) yang menyatakan bahwa *good governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu, hasil penelitian ini searah dengan *stewardship theory* yang menyebutkan bahwa manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya untuk kepentingan publik.

Akuntabilitas dan transparansi terbukti dari terdapatnya laporan keuangan yang mana berisi neraca, laporan rancangan anggaran, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dari Pemerintah Kota Semarang yang dapat diakses pada ppid@semarangkota.go.id. Pelaporan anggaran dan realisasi anggaran tersebut dapat menandai adanya keadilan dalam rule of law, mengingat kekayaan yang tersedia pada Pemerintah Kota Semarang telah dikelola sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat secara adil dan sesuai dengan aturan yang ada.

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil uji t menunjukkan bahwa pada variabel pengendalian internal memiliki nilai t hitung $3,688 > t_{\text{tabel}} 1,986$ serta memiliki nilai sign $0,000$ yang mana $< 0,05$. Oleh karena itu, H2 diterima yang menandakan bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kinerja pemerintah daerah. Perolehan tersebut selaras dengan Saputro (2021) dan Elkha (2020) yang menyimpulkan bahwa pengendalian internal secara parsial mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hasil ini sejalan dengan *stewardship theory* yang menyatakan bahwa manajemen akan bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya dengan terintegrasi dan bijaksana untuk kepentingan organisasi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik-praktik pengendalian internal yang kuat, seperti prosedur, kebijakan dan mekanisme, dapat mendukung peningkatan kinerja pemerintah dengan memastikan bahwa terdapat lingkungan yang baik bagi manajemen dalam mengelola sumber daya publik secara terintegrasi, bijaksana dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *stewardship*. Upaya pengendalian internal Pemerintah Kota Semarang dilakukan dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan register risiko yang dibentuk oleh Bappeda Kota Semarang. Apabila risiko dan pengamanan serta pengendalian risiko itu mampu dikendalikan, hasilnya dapat meningkatkan kinerja sehingga apabila pengendalian internal meningkat maka kinerja pemerintah daerah akan meningkat.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil uji t menunjukkan bahwa pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai t hitung $1,531 < t_{\text{tabel}} 1,986$ serta memiliki nilai sign $0,129$ yang mana $> 0,05$. Oleh karena itu, H3 ditolak yang menandakan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Perolehan tersebut selaras dengan Triwulandari dkk (2022) yang membuktikan pelaksanaan SAKD tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Narasumber beranggapan bahwa SAKD telah dilaksanakan secara terintegrasi. Sedangkan berdasarkan pengamatan yang dilakukan, terdapat ketidakdisiplinan pemda dalam melakukan pekerjaannya. Dilansir dari web Pemerintah Kota Semarang, pada Mei 2024 terdapat keterlambatan dalam pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Artinya, meskipun SAKD telah diterapkan namun sistem ini belum mampu mendeteksi adanya ketidakdisiplinan yang mengakibatkan tidak pekerjaan tidak efektif sehingga berdampak pada output dari pekerjaan tersebut. Output tersebut menjadi salah satu indikator dari kinerja pemerintah daerah. Dengan output yang kurang efektif maka berdampak pada kinerja yang kurang baik. Terlebih lagi, kinerja pemda dipengaruhi oleh banyak hal lain yang signifikan yang berada di luar penelitian ini. Pernyataan tersebut didukung oleh adanya jumlah R square yang mencapai 44,6% yang berarti 55,4% lainnya diintervensi oleh variabel lain dimana tidak diteliti pada riset ini.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil olah data dapat disimpulkan bahwa variabel *good governance* dan pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kinerja pemerintah daerah di Pemerintah Kota Semarang. Sedangkan variabel sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pemerintah daerah di Pemerintah Kota Semarang.

Keterbatasan

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan, yaitu :

1. Nilai Adjusted R square hanya sebesar 44,6%. atau kurang dari 50%, sehingga dapat diketahui bahwa adanya variabel lain di luar variabel yang diteliti dalam riset ini dimana dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 55,4%.
2. Ruang lingkup objek penelitian terbatas dikarenakan hanya mencakup Pemerintah Kota Semarang.
3. Indikator yang digunakan dalam variabel *good governance* hanya menggunakan 4 indikator sesuai dengan prinsip UNDP dalam *good governance* pada administrasi publik dalam Sedarmayanti (2004).

Saran

Setelah melihat kesimpulan dan keterbatasan tersebut, dapat diberikan rekomendasi, yaitu Penelitian berikutnya disarankan memberikan tambahan variabel independen di luar riset ini agar kesimpulan yang diambil menjadi lebih luas. Selain itu, penelitian berikutnya sebaiknya, memperluas cakupan objek yang lebih besar, tidak hanya pada lingkup kota saja. Terlebih lagi, penelitian berikutnya dapat menambahkan indikator pada variabel *good governance* agar dapat menjelaskan penerapan *good governance* secara lebih luas.

REFERENSI

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16: 49-64.

ELKHA, E. (2020). PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, AKUNTABILITAS, DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(2), 2- 19. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/search/search>

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ireeuw, S. V., Allo Layuk, P. K., & Rante, A. (2020). Pengaruh PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Dan SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Jayapura). *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN DAERAH*, 14(1). <https://doi.org/10.52062/jakd.v14i1.1447>

Kompas Cyber Media. (2023, February 2). Ketika wali Kota Semarang Tegur OPD Yang Tak Serius Garap Potensi PAD. *KOMPAS.com*. <https://regional.kompas.com/read/2023/02/02/234922478/ketikawali-kota-semarang-tegur-opd-yang-tak-serius-garap-potensi-pad>

Kompas Cyber Media. (2023, January 18). Direktur RSUD Wongsonegoro Dan wali Kota Semarang Dituding Tak Membayar Insentif COVID-19 untuk Nakes. *KOMPAS.com*. <https://regional.kompas.com/read/2023/01/18/135142878/direkturrsud-wongsonegoro-dan-wali-kota-semarang-dituding-tak-membayar>

Lestari, & Mutoriogh. (2020). PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus OPD Kabupaten Kendal). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, 7(1), 43-53. <https://journal.febuniss.ac.id/home/article/view/20>

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : CV Andi Offset

Mulyadi. 2013. *Auditing Buku I*. Jakarta: Salemba Empat.

Nusi, Y. F. N. ANALISIS EFEKTIVITAS ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA FAFAI DISTRIK DEMBA KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2015-2016.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

PP Nmor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern.

Putra, D. D., Rantelangi, C., & Diyanti, F. (2022). Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah pada dinas perdagangan Kota Samarinda. *Kinerja*, 7, 34-44. Copyright@year owned by Author(s). Published by JIAM

Saputro, & Efendi. (2021). PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PEGAWAI KECAMATAN TAMBAKSARI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(9), 2- 16. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4171>

Sedarmayanti, G. G. (2004). bagian kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang baik). Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Semarang, P. (2024, May 8). Ada Keluhan Soal Keterlambatan Gaji PPPK Di Kota Semarang, Mbak ita Segera Selesaikan Persoalan | Pemerintah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang. https://semarangkota.go.id/p/5942/ada_keluhan_soal_keterlambatan_gaji_pppk_di_kota_semarang,_mbak_ita_segera_



Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung : Alfabeta.

Triwulandari, E., Pratiwi, D. N., & Darmanto, D. (2022). Faktor-faktor Yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 2(3), 158-166. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v2i3.432>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Pasal 3 dan 5, Asas Umum Penyelenggaraan Negara.